

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurraysid, Priyatna, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska & Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan)*, Cetakan Ke-2, UII Press, Yogyakarta.
- Anwar, Khoirul, 2018, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Arifin, Muhammad, 2016, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2017, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Cetakan ke-4, Depok.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2018, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Cetakan Ke-5, Jakarta.
- Basir, Cik, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Djauhari, Achmad, 2006, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, BASYARNAS, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System a Social Science Perspective)*, Nusa Media, Cetakan Ke-2, Bandung.
- Hasan, Hasbi 2010, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Gramata Publishing, Depok.
- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cetakan ke-4, Malang.
- Indrati, Maria Farida, 2015, *Ilmu Perundang-undangan*, Cetakan Ke-16, Kanisius, Yogyakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2019, *Logika Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-2, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2008, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Ke-6, Nusamedia, Bandung.
- Manan, Abdul, 2016, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta.
- Mardjono, Hartono, 1997, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-12, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ngatino, dan Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panggabean, Henry P, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Sinar Harapan, Cetakan ke-1, Jakarta.
- Suadi, Amran, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik (Edisi Revisi)*, cetakan ke-2, Kencana, Depok.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunarto, 2015, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Mahkamah Agung, 2011, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi dengan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Yuliandri, 2013, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-4, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Abdurrosyid, Dendi, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura Volume 4 Nomor 4, November 2015.
- Anggono, Bayu Dwi, *Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro Jilid 47 Nomor 1, Januari 2018.
- Hamidah, Siti, Irham Rahman, Ummu Hilmy, *Analisis Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014.
- Imaniyati, Neni Sri, *Choice of Forum Dalam Penyelesaian Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia Tahun ke 40 No. 3, Juli 2010.

- Imaniyati, Neni, *Metode dan Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013*, Jurnal Scientica Universitas Islam Bandung Volume I Nomor 1, Juni 2013.
- Imaniyati, Neni Sri, Panji Adam, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Perbankan Syariah*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora Universitas Islam Bandung Volume 5 Nomor 1, 2015
- Imaniyati, Neni Sri, Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Kompetensi Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Basyarnas pada Sengketa Perbankan Syariah Menuju Unifikasi Hukum*, Jurnal Hukum Acara Perdata Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Kholid, Muhammad, *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jurnal Adliya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni 2015
- Najib, Ainun, *Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Volume 26, Nomor 3, September 2019.
- Najib, Ainun, *Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Volume 16 Nomor 4, Desember 2019.
- Prakoso, Andria Luhur, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah*, Jurnal Jurisprudence Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume 7 Nomor 1, 2017.
- Pramudya, Kelik, *Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional Volume 7, Nomor 1, April 2018.
- Saraswati, Retno, *Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret Volume 2 Nomor 3, September-Desember 2013.
- Sholikin, Nur, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Jurnal Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional, Februari 2017.
- Simanjuntak, Enrico, *Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI*, Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Volume 2, Nomor 3, November 2013.

Sumardi, Juajir, Andi Tenri Soraya, M. Arfin Hamid, *BASYARNAS Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin Volume 3, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 178-179.

Umam, Khotibul, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Volume 12 Nomor 4, Desember 2015.

Uzma, Ummi, *Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia Tahun ke 43 Juli-September 2013.

Winata, M. Reza dan Zaka Firman Aditya, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Dewan Perwakilan Rakyat RI Volume 9, Nomor 1, Juni 2018.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Aziz, Noor M, 2010, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-undangan Diluar Hierarki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Hasil Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Effendi, Muchsin, 2009, *Eksekusi Terhadap Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Perspektif Yuridis dan Sosiologis)*, Tesis, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Nugroho, Harimurti, 2007, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Studi Komparasi Tentang Karakteristik, Kompetensi, dan Prosedur)*, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Rizqi, Hakam, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No.792/Pdt.G/2009/PA Jakarta Pusat Tentang Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Santoso, Listyo Budi, 2009, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Sofiana, Ratna, 2015, *Implikasi Tugas Dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.93/Puu-X/2012 tentang Pengujian Konstitusional Undang-Undang No 21*

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Tesis, Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Triana, Niken Dyah, 2011, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

D. Makalah

Annas, Syaiful, *Kewenangan Eksekusi Putusan BASYARNAS* (Sebuah Kajian Terhadap Pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasca Lahirnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016), Makalah, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kewenangan-eksekusi-putusan-basyarnas-oleh-syaiful-annas-8-6>, Jakarta, 08 Juni 2017.

Hidayat, M. Yeri dan Zuhurul Anam, *Prosedur Eksekusi Putusan Basyarnas, Hak Tanggungan Dan Putusan Pengadilan Agama yang Simetris*, Makalah, dalam <https://www.pa-sanggau.go.id/artikel/prosedur-eksekusi-putusan-basyarnas-hak-tanggungan-dan-putusan-pengadilan-agama-yang-simetri>, Sanggau, 26 Agustus 2018.

E. Internet

Hermansyah, *Membedah Perma Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/membedah-perma-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20222/sema-soal-arbitrase-syariah-siap-diluncurkan/>

Mertokusumo, Sudikno, *Sistem Peradilan di Indonesia*, dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/>

F. Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Perubahan Pertama sampai Keempat, Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan Keenambelas, 2017.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Diundangkan di Jakarta pada 30 Desember 1985. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316 untuk Penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Diundangkan di Jakarta pada 29 Desember 1989. Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1989 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 untuk Penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diundangkan di Jakarta pada 12 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 untuk Penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Diundangkan di Jakarta pada 20 Maret 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 untuk Penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Diundangkan di Jakarta pada 16 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867 untuk Penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diundangkan di Jakarta pada 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 untuk Penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diundangkan di Jakarta pada 12 Agustus 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 untuk Penjelasannya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Diundangkan di Jakarta pada 29 Desember 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

G. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP perihal Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak, 10 Desember 2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 188/K/AG/2010 perihal Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam tingkat banding, 09 Juni 2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/AG/2011 perihal Peninjauan Kembali
Putusan Mahkamah Agung Nomor 188/K/AG/2010 dalam tingkat peninjauan
kembali, 01 Desember 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Agustus
2013.